

Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2012-2020

Analysis of income inequality between regions in Lampung Province 2012-2020

F Y Lestari¹, M I Affandi², dan R H Ismono²

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Pascasarjana Multidisiplin, Universitas Lampung, Indonesia

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Indonesia

Corresponding author's email: fyi.lestari@gmail.com

Abstrak. Perbedaan potensi keunggulan daerah dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap perekonomian lokal yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan yang besar dalam tingkat pertumbuhan dan potensi antar daerah menyebabkan dikotomi daerah maju dan tertinggal yang menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung dari tahun 2012 hingga 2020. Data yang digunakan adalah data panel PDRB untuk 17 sektor ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder *time series* dan *cross-section* dari 15 kabupaten/kota di Lampung yang diolah dengan analisis *entropy theil*. Menurut hasil analisis, pendapatan daerah menunjukkan kontribusi positif terhadap ketimpangan pendapatan. Walaupun demikian, secara keseluruhan keterkaitan antar kedua hal tersebut tergolong rendah. Secara detail, kontribusi kabupaten dengan ketimpangan tinggi adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu. Kontribusi ketimpangan sedang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Tanggamus. Kontribusi ketimpangan yang rendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, dan Pantai Barat.

Kata Kunci: *Indeks Entropy Theil; Ketimpangan Pendapatan; Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract. Differences in potential regional advantages encourage different contributions to the local economy which is the driving force for regional economic growth. The large differences in growth rates and potential among regions lead to a dichotomy of developed and underdeveloped regions with significant inequality. This study aimed to analyze income inequality among regions in Lampung Province from 2012 to 2020. The data used is GDP panel data for 17 economic sectors. The data used are time series secondary data and cross-sections from 15 regencies/cities in Lampung which were processed by theil entropy analysis. According to the results of the analysis, regional income shows a positive contribution to provincial income inequality. However, overall the relationship between the two is relatively low. In detail, the contribution of districts with high inequality are Bandar Lampung City, Metro City, and Pringsewu Regency. The contribution of inequality is occurring in the regencies of South Lampung, North Lampung, Central Lampung, Way Kanan, and Tanggamus. The low contribution of inequality is found in West Lampung, East Lampung, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, and Pantai Barat districts.

Keywords: Economic Growth; Income Equality; Theil Entropy Index

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di setiap daerah mengalami berbagai permasalahan yang dapat menghambat pembangunan di suatu daerah. Lebih lanjut tentang Kuncoro dalam Pamrihan dan Cahyadin [1] mengidentifikasi persoalan utama dalam pembangunan daerah adalah tetap menekankan adanya kebijakan pembangunan dengan pendekatan potensi unggulan daerah. Kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya alam dapat digunakan untuk melihat bagaimana potensi daerah yang dimiliki. Provinsi Lampung berada paling selatan di Pulau Sumatera dengan potensi sumber daya alam yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi terbesar PDRB Provinsi Lampung masih disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata 30,55 persen selama lima tahun terakhir (2016-2020). Di sisi lain, pertumbuhan sektor industri pengolahan juga terus menunjukkan pertumbuhan positif dengan laju pertumbuhan 0,44 persen per tahun atau dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung sebesar 17,86 persen per tahun pada periode 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masih terfokus pada sektor pertanian dengan tujuan utama, yakni adanya keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Lampung mengakibatkan daerah maju dan daerah tertinggal atau pasif.

Identifikasi potensi di setiap daerah dapat menunjukkan sektor-sektor potensial apa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi masing-masing sektor yang membentuk perekonomian daerah dapat menunjukkan pertumbuhan pembangunan di daerah tersebut. Dominasi sektor pertanian masih menjadi *leading sector* dalam menggerakkan perekonomian Indonesia atau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sektor pertanian merupakan *engine of growth* sebagai penyedia bahan baku, penyedia pangan,

keterbukaan kesempatan kerja, dan penggerak daya beli yang dihasilkan oleh sektor lain. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II-2020 tercatat sebesar 15,46 persen.

Angka tersebut naik dari kontribusi pada triwulan II-2019 yang hanya 13,57 persen [2]. Sektor pertanian yang terus berkembang baik dari sisi *supply* maupun *demand* akan mendorong pembangunan ekonomi di suatu daerah [3]. Pembangunan daerah masih terfokus pada sektor ekonomi yang strategis atau pada lokasi-lokasi yang dianggap strategis. Hal ini dapat mempengaruhi sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus pembangunan pada suatu sektor ekonomi [4].

Lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Provinsi Lampung adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan/manufaktur. Amalina dan Romantis [5] menunjukkan bahwa fluktuasi PDRB sektor pertanian juga diikuti oleh industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan tidak lepas dari kabupaten/kota yang berkontribusi terhadap perekonomian Provinsi Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah di Provinsi Lampung dapat mengakibatkan daerah maju dan daerah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung harus dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota, hal ini terjadi jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan ketimpangan pendapatan daerah yang kecil. Menurut Rustiadi, Indraprahasta, dan Mulya [6] menyebutkan bahwa ketimpangan wilayah masih menjadi isu pembangunan yang relevan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Perbedaan potensi sumber daya akan menunjukkan perbedaan struktur dan pola pertumbuhan ekonomi di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Struktur dan pola perekonomian dapat menentukan besar kecilnya kontribusi yang diberikan masing-masing wilayah terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik [7] menyatakan bahwa indeks ketimpangan pendapatan secara keseluruhan di Provinsi Lampung sebesar 0,329 pada tahun 2019, lebih rendah dari rata-rata indeks ketimpangan nasional sebesar 0,384. Hal yang berbeda ditunjukkan dengan kontribusi dan nilai PDRB di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung cenderung berbeda yang berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah. Salah satu target pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, yakni ketimpangan pendapatan antar daerah [8]. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung tahun 2012-2020.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data deret waktu (*time series*) dan *cross section*. Periode waktu yang digunakan adalah tahun 2012–2020. Data yang digunakan, yakni data antar wilayah di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung. Sumber data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2012-2020.

Analisis indeks *entropy theil* digunakan untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar wilayah. Perhitungan indeks *entropy theil* tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan 17 sektor berdasarkan lapangan usaha di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2012-2020. Data yang digunakan adalah PDRB ADHK setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2020. Langkah-langkah menghitung indeks entropi adalah sebagai berikut.

$$P_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p X_{ij}} \dots\dots\dots (1)$$

Informasi:

- P_{ij} : Peluang kegiatan sektor ekonomi i di j wilayah
- X_{ij} : Jumlah PDRB sektor ekonomi pada tahun tertentu
- i : 1,2,.....,n jumlah baris (sub wilayah)
- J : 1,2,.....,n jumlah kolom (kegiatan)

$$Q_{ij} = Ln(P_{ij}) \dots\dots\dots (2)$$

Informasi:

- Q_{ij} : Ln peluang kegiatan ekonomi tipe j di wilayah i
- P_{ij} : probabilitas aktivitas tipe j di wilayah i
- i : 1,2,.....,n jumlah baris (sub wilayah)
- J : 1,2,.....,n jumlah kolom (aktivitas)

$$S_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p R_{ij} \dots\dots\dots (3)$$

Informasi:

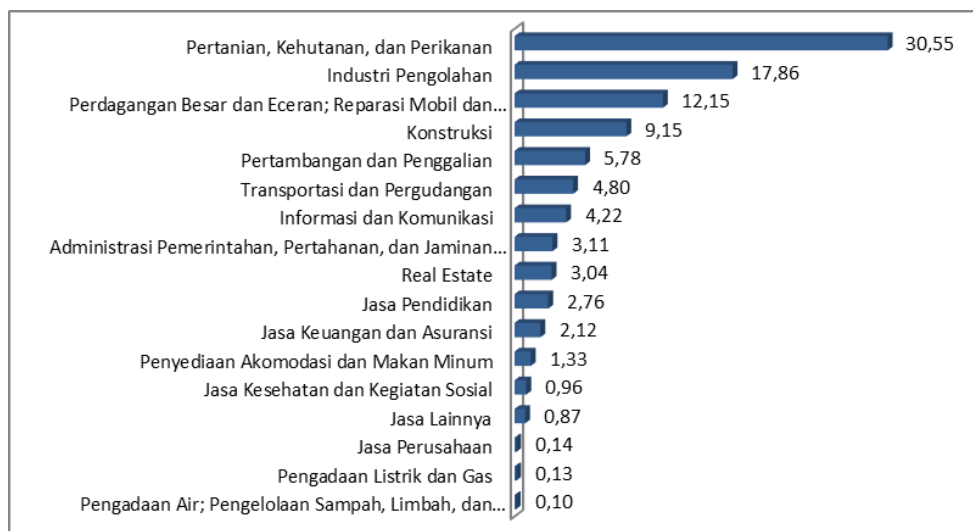
- S_{ij} : Total entropi area (S total)
- R_{ij} : Perkalian matriks –P_{ij} dan C_{ij}
- i : 1,2,.....,n jumlah baris (sub wilayah)
- J : 1,2,.....,n jumlah kolom (aktivitas)

Semakin besar nilai *entropy theil* (mendekati satu) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di suatu wilayah semakin besar atau ketimpangan di suatu wilayah tidak merata. Sebaliknya, jika nilai *entropy theil* semakin kecil (mendekati nol) maka dapat disimpulkan ketimpangan pendapatan suatu wilayah semakin kecil atau ketimpangan di suatu wilayah semakin merata [1].

3. Hasil penelitian dan pembahasan

Kinerja perekonomian secara keseluruhan di setiap wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja ekonomi yang terjadi dapat menunjukkan kondisi perekonomian Provinsi Lampung. Kondisi ekonomi yang terjadi dapat tumbuh secara baik, secara positif maupun negatif. Seluruh sektor ekonomi dengan 17 lapangan usaha dapat

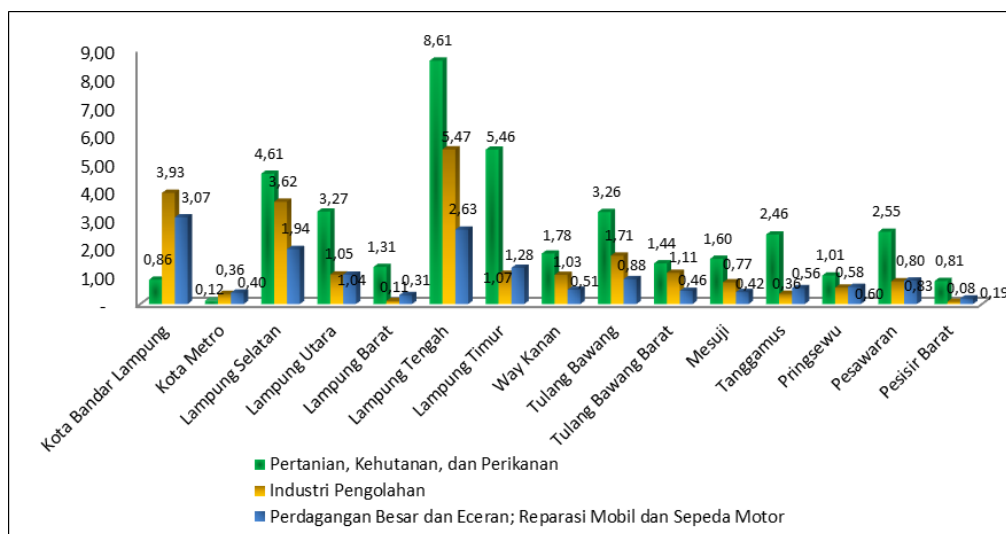
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Beberapa sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Provinsi Lampung, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan. Gambar 1 menunjukkan kontribusi 17 sektor lapangan usaha terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2012-2020.



Gambar 1. Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2012-2020.

Sebesar 31,62 persen sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan sebesar 17,57 persen; dan perdagangan besar dan eceran sebesar 12,15 persen berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Provinsi Lampung (Gambar 1). Pertumbuhan ekonomi di 15 kabupaten/kota, yang dinyatakan dalam PDRB memperlihatkan seberapa besar sumbangan masing-masing daerah terhadap ekonomi Provinsi Lampung. Perbedaan kontribusi yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang tersedia.

Gambar 2 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki lima kabupaten yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu Kabupaten Lampung Tengah (8,61%), Lampung Timur (5,46%), dan Lampung Selatan (4,61%), Tulang Bawang (3,26%), dan Pesawaran (2,55%). Sementara itu, Kabupaten Lampung Tengah (5,47%), Kota Bandar Lampung (3,93%), Lampung Selatan (3,62%), Tulang Bawang (1,77%), dan Tulang Bawang Barat (1,11%) yang memberikan kontribusi terbesar pada industri pengolahan. Industri pengolahan sendiri merupakan sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Lampung. Dilihat dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan, ada beberapa daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Provinsi Lampung.



Gambar 2. Kontribusi kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Lampung berdasarkan tiga sektor usaha terbesar tahun 2012-2020.

Berbeda dengan beberapa kabupaten tersebut, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 0,86 di Kota Bandar Lampung, tetapi pada sektor industri pengolahan mampu menjadi daerah dengan kontribusi terbesar kedua di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan posisi Kota Bandar Lampung pada posisi geografis yang strategis didukung dengan aksesibilitas yang tinggi mampu mendorong kegiatan di sektor manufaktur. Bandar Lampung, yakni salah satu daerah yang menjadi unggulan pada pusat pertumbuhan Sumatera Selatan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, dan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa lokasi Bandar Lampung yang strategis sebagai pintu gerbang ke Pulau Jawa, adanya jalur Trans-Sumatera, dan keberadaan pelabuhan Panjang.

Penyumbang terbesar ketiga bagi perekonomian Provinsi Lampung adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, yaitu dari Kabupaten/Kota Bandar Lampung (3,07%), Lampung Tengah (2,63%), Lampung Selatan (1,94%), Lampung Timur (1,28%), dan Lampung Utara (1,04%). Perbedaan sumbangan ekonomi di Provinsi Lampung didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Potensi tersebut akan mendorong pertumbuhan di beberapa sektor dan daerah untuk tumbuh baik dari sisi ekonomi maupun pengolahan sumber bahan baku.

Analisis *entropy theil* digunakan untuk menghitung nilai ketimpangan berdasarkan PDRB yang dihasilkan oleh 17 sektor usaha. Setiap sektor menghasilkan besaran kontribusi pendapatan yang berbeda terhadap pendapatan daerah di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah yang mempengaruhi nilai pendapatan [9]. Perbedaan sumber daya ini menyebabkan disparitas antar wilayah dan antar sektor. Pembangunan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan dapat

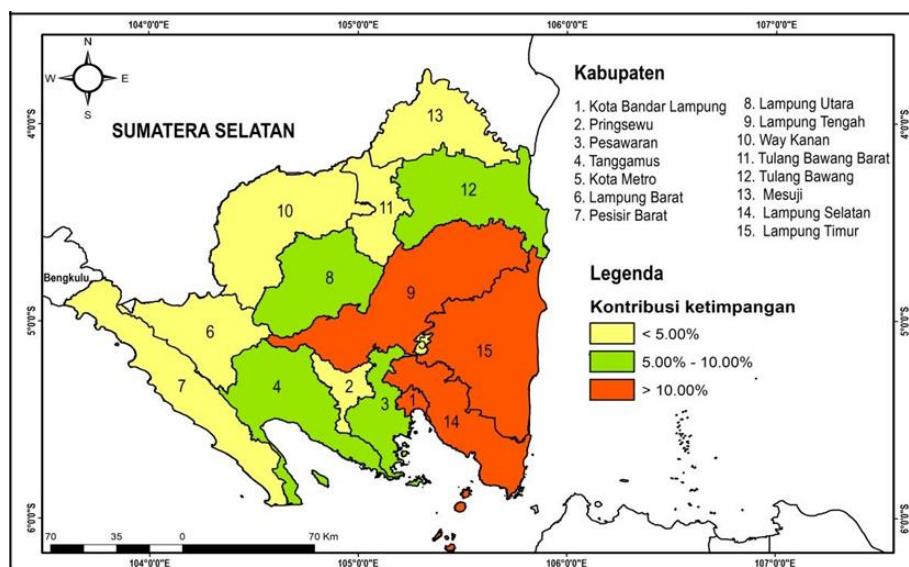
menyebabkan suatu daerah hanya bertumpu pada satu sektor unggulan. Ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks *entropy theil* 15 kabupaten/kota Tahun 2012-2020.

No.	Kabupaten/Kota	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bandar Lampung	0,644	0,645	0,653	0,658	0,663	0,668	0,672	0,677	0,679
2	kota Metro	0,111	0,111	0,111	0,112	0,113	0,113	0,113	0,114	0,114
3	Lampung Selatan	0,503	0,502	0,504	0,505	0,506	0,507	0,508	0,509	0,508
4	Lampung Utara	0,315	0,315	0,316	0,317	0,318	0,320	0,321	0,323	0,323
5	Lampung Barat	0,115	0,115	0,116	0,116	0,116	0,116	0,117	0,118	0,118
6	Lampung tengah	0,687	0,687	0,691	0,692	0,695	0,697	0,699	0,702	0,706
7	Lampung Timur	0,499	0,505	0,499	0,497	0,496	0,498	0,495	0,493	0,492
8	Cara yang benar	0,205	0,203	0,203	0,204	0,204	0,204	0,204	0,205	0,206
9	tulang bawang	0,291	0,292	0,293	0,293	0,294	0,295	0,297	0,297	0,298
10	Tulang Bawang Barat	0,166	0,166	0,166	0,166	0,167	0,167	0,167	0,168	0,169
11	Mesuji	0,150	0,149	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,151	0,151
12	Tanggamus	0,225	0,225	0,227	0,227	0,227	0,228	0,229	0,229	0,229
13	Pringsewu	0,179	0,179	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
14	Menawarkan	0,229	0,228	0,229	0,229	0,228	0,228	0,229	0,229	0,230
15	pantai barat	0,078	0,078	0,078	0,077	0,077	0,078	0,078	0,079	0,079
	Rata-rata	0,293	0,293	0,294	0,295	0,296	0,297	0,297	0,298	0,299

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Lampung memberikan kontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung yang ditunjukkan dengan nilai *entropy theil* yang positif. Rata-rata indeks entropi di 15 kabupaten/kota sejalan dengan hasil analisis indeks Williamson Provinsi Lampung. Diketahui bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung periode 2012-2020 dengan kontribusi 15 kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Nilai *entropy theil* yang dihasilkan di setiap kabupaten/kota Provinsi Lampung menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang rendah dengan rata-rata 0,296. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Lampung semakin meningkat setiap tahunnya, tetapi kategori ketimpangannya rendah [10].

Hasil analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dengan nilai indeks *entropy theil* positif. Tabel 1 memperlihatkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan di setiap kabupaten/kota tidak terjadi secara signifikan. Kabupaten Lampung Tengah memiliki nilai *entropy theil* tertinggi dengan rata-rata 0,695; diikuti oleh Kota Bandar Lampung dengan rata-rata 0,662; dan Kabupaten Lampung Selatan dengan rata-rata 0,505. Kabupaten Pesisir Barat memiliki nilai indeks *entropy theil* terkecil di Provinsi Lampung dengan rata-rata 0,078. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan sumber daya, alokasi daerah, dan kebijakan ekonomi daerah menyebabkan kontribusi ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.

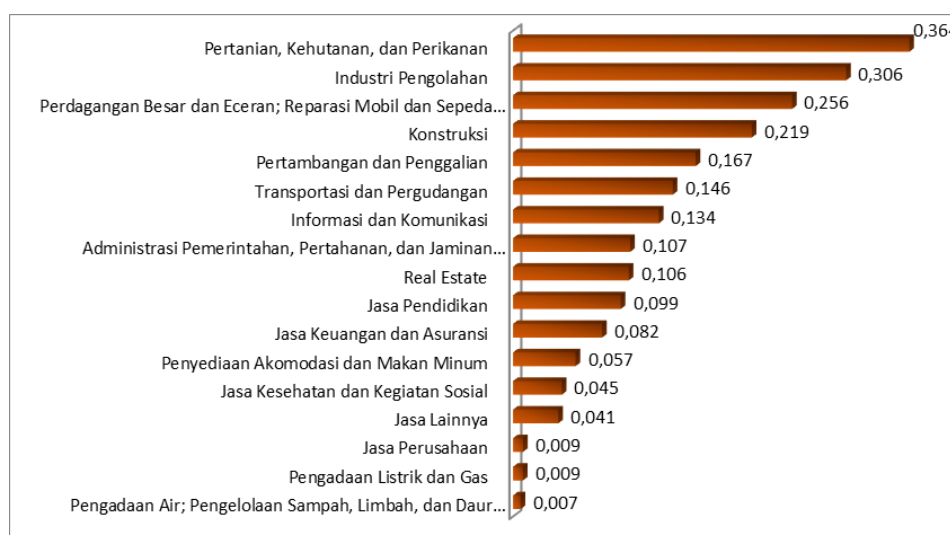


Gambar 3. Kontribusi pendapatan di Provinsi Lampung [11].

Gambar 3 menunjukkan distribusi kontribusi ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung di 15 kabupaten/kota. Terlihat bahwa kontribusi kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dengan kontribusi < 5,00%, yaitu Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji dengan kontribusi terendah, yaitu di Kabupaten Pesisir Barat (1,76%). Kontribusi ketimpangan pada kisaran 5,00%-10,00%, yaitu pada Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Kontribusi ketimpangan pendapatan terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah (15,67%), disusul Kota Bandar Lampung (14,93%), Kabupaten Lampung Selatan (11,40%), dan Kabupaten Lampung Timur (11,20%).

Tingkat ketimpangan di Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun karena kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Lampung masih dianggap kurang tepat [12]. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus dilakukan dengan memperluas sektor-sektor yang menjadi basis perekonomian daerah-daerah yang termasuk dalam kategori belum berkembang, agar dapat mengimbangi pembangunan ekonomi daerah-daerah yang sudah masuk kategori negara maju. Tidak semua kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan mampu mengurangi tingkat ketimpangan antar kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ketimpangan pendapatan antar sektor yang cenderung meningkat walaupun dengan peningkatan kecil dapat disebabkan oleh pola pembangunan ekonomi secara sektoral, dimana sektor yang memberikan keuntungan atau kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah akan diprioritaskan dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi [13]. Lokasi yang dipilih umumnya merupakan kawasan yang telah memiliki berbagai infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pengembangan sektor unggulan tersebut sehingga daerah yang berkembang akan semakin berkembang, sedangkan daerah lain yang belum berkembang secara ekonomi sulit untuk mengejar ketertinggalan dari daerah tersebut.

Keunggulan sektor utama Provinsi Lampung yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil. Ketiga sektor tersebut masih belum merata dalam pembangunan dan kebijakan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan pendapatan di Provinsi Lampung. Sektor pertanian memberikan kontribusi nilai ketimpangan yang paling besar karena sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama masyarakat di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung terkenal dengan pertaniannya dimana beberapa komoditas unggulan dan komoditas ekspor dihasilkan di Provinsi Lampung. Beberapa komoditas ekspor yang dihasilkan dari sektor pertanian di Provinsi Lampung antara lain kopi, karet, dan kelapa sawit. Beberapa komoditas dari Provinsi Lampung dikirim ke luar daerah sehingga akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi perekonomian daerah. Besarnya ketimpangan pendapatan per sektor di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 4.

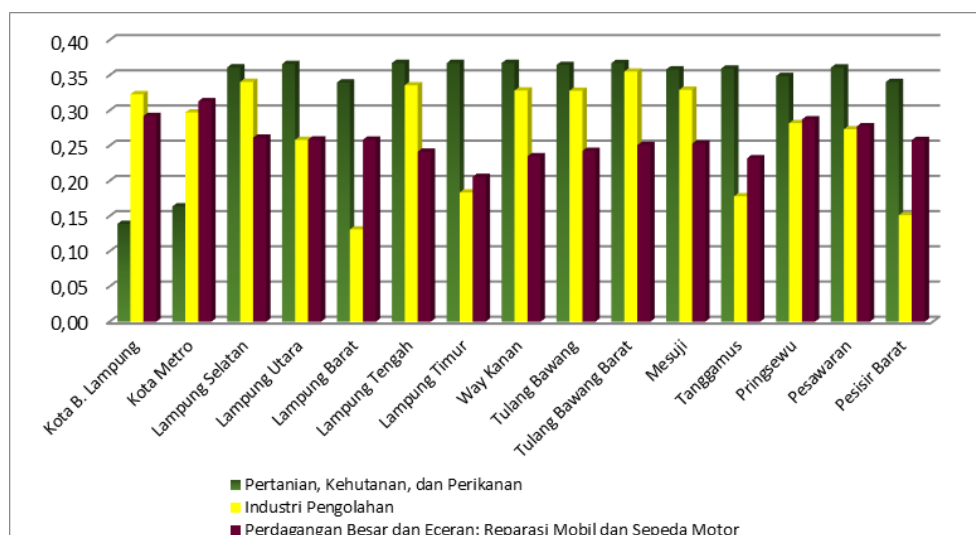


Gambar 4. Nilai indeks *entropy theil* untuk masing-masing sektor di Provinsi Lampung.

Gambar 4 menunjukkan nilai ketimpangan pendapatan pada 17 sektor ekonomi di Provinsi Lampung. Nilai ketimpangan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tertinggi sebesar 0,364, disusul oleh industri pengolahan sebesar 0,306. Sektor pertanian sangat unggul di hampir setiap kabupaten kecuali Bandar Lampung dan Metro. Gambar 5 menunjukkan industri pengolahan; grosir, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi ketimpangan pendapatan terbesar di Kota Metro, dengan sektor industri pengolahan di Bandar Lampung.

Setiap daerah memiliki kepemilikan sumber daya alam yang berbeda dan pendapatan yang berbeda pula sehingga terdapat perbedaan dukungan keuangan dari masing-masing sektor. Sektor pertanian merupakan sektor utama di setiap kabupaten Lampung, disusul oleh industri pengolahan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di setiap kabupaten di Provinsi

Lampung, disusul oleh sektor industri pengolahan, sedangkan di kawasan perkotaan di Provinsi Lampung sektor unggulan adalah industri pengolahan di Kota Bandar Lampung dan perdagangan besar dan eceran, mobil, dan sepeda motor di Kota Metro (Gambar 5). Melimpahnya sumber daya bahan baku menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Lampung menjadi sektor basis. Jenis produk yang dikembangkan di setiap kabupaten dan unggulan juga berbeda-beda.



Gambar 5. Sektor yang berkontribusi terhadap ketimpangan di setiap kabupaten/kota.

Tanaman pangan menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, dan Lampung Tengah. Di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pringsewu, ketimpangan pendapatan yang besar disumbang oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan memiliki nilai yang hampir seimbang. Hal ini dapat terjadi karena hasil sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta industri pengolahannya berada dalam satu kabupaten. Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu sebagai sentra produksi tanaman pangan memiliki industri pengolahan penggilingan padi untuk mengolah produknya. Kawasan industri pengolahan beras berada pada sentra produksi beras, yaitu di Kabupaten Lampung Tengah [14]. Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat perusahaan besar yang mengolah singkong menjadi tepung tapioka dan bahan baku tepung tapioka dihasilkan dari hasil pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah maupun di kabupaten lainnya. Secara historis, Kabupaten Lampung tengah yang merupakan daerah transmigran sebagian besar usaha tani ubi kayu ditanam sebagai bahan baku tapioka sebelum menghasilkan tanaman lain.

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Barat memiliki nilai ketimpangan pendapatan yang lebih rendah di sektor industri pengolahan jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya karena di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan sentra produksi kopi dan kelapa sawit, tetapi belum banyak industri pengolahan untuk diproses lebih lanjut di kabupaten ini. Kemampuan daya saing yang berorientasi ekspor membuat sebagian besar industri pengolahan kopi di Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dikarenakan agroindustri pengolahan kopi membutuhkan fasilitas dan aksesibilitas untuk kemudahan dalam melakukan ekspor sehingga lokasi industri cenderung berlokasi di dekat Pelabuhan Panjang sebagai fasilitas pelabuhan ekspor utama di Provinsi Lampung [14].

4. Kesimpulan

Ketimpangan pendapatan di 15 kabupaten/kota di Lampung telah menunjukkan kontribusi positif terhadap ketimpangan pendapatan di Lampung, tetapi secara keseluruhan berada pada kategori rendah. Kontribusi kabupaten dengan ketimpangan yang tinggi adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu. Kontribusi ketimpangan sedang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Tanggamus. Kontribusi ketimpangan yang rendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, dan Pantai Barat. Peningkatan nilai tambah pada sektor ekonomi daerah dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Lampung.

Referensi

- [1] Pamrihnan A, Cahyadin M. Analisis dan Identifikasi Ketimpangan Pendapatan Sektor Basis Antar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014. *J Ilmu Ekon Dan Pembang* 2016;16.
- [2] Timorria IF. Kuartal II/2020, BPS: Kontribusi Pertanian terhadap PDB Justru Naik. *EkonomiBisnisCom* 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200805/9/1275293/kuartal-ii2020-bps-kontribusi-pertanian-terhadap-pdb-justru-naik>.
- [3] Ningsih ESM. Analisis Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo Sebelumnya dan Selama Otonomi Daerah. Universitas Sebelas Maret, 2010.
- [4] Putro BS. Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian di Kabupaten Wonogiri. Universitas Sebelas Maret, 2011.
- [5] S. DHA, Asmara A. Keterkaitan Antara Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan di Indonesia. *J Agribisnis Dan Ekon Pertan* 2009;3:69–80.
- [6] Rustiadi E, Sefulhakim S, Panuju DR. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2018.
- [7] BPS. Gini Ratio Maret 2021 2021.
- [8] Pemerintah Provinsi Lampung. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 2019.
- [9] Antika U, Mardiana, Taryono. Ketimpangan Pendapatan Perkapita di Pulau Sumatera Tahun 2003-2013. *J Online Mhs Fak Ekon Univ Riau* 2015;2:1–11.
- [10] Sari RM. Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *J Online Mhs Bid Perenc Wil Dan Kota* 2017;1.
- [11] Geospasial B. I. Peta Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *TanahairIndonesiaGold* 2021. <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web>.

- [12] Halvis, Emalia Z. Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Lampung. *J Ekon Pembang* 2019;8. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jep.v8i1.34>.
- [13] Suhartono. Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. *J Organ Dan Manaj* 2011;7. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.94.2011>.
- [14] Affandi MI. Peran Agroindustri dalam Perekonomian Daerah Provinsi Lampung: Analisis Keterkaitanktor dan Aglomerasi Industri. Bogor: IPB Scientific Repository; 2010.